

## BAB II

### *Sustainable Development Goals & Kondisi Pangan di Tiongkok*

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah singkat *SDGs* yang merupakan lanjutan dari *MDGs* yang sebelumnya gagal dalam mencapai *goals* yang sudah ditetapkan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kondisi pangan di Tiongkok yang mencakup bagaimana standar dan sasaran dari *SDGs* yang telat diimplementasikan Tiongkok, sumber daya manusia dalam memaksimalkan proses implementasi *SDGs* serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung implementasi dari *SDGs* itu sendiri. Bab ini juga akan melihat bagaimana kondisi *food security* di Tiongkok yang akan mencakup ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, tingkat kesehatan dan nutrisi dari masyarakat di Tiongkok, dan bagaimana stabilitas dari ketersediaan, akses, dan tingkat kesehatan tersebut.

#### **2.1. Sejarah Sustainable Development Goals.**

Selama 15 tahun, *MDGs* mendorong kemajuan di beberapa bidang penting seperti mengurangi kemiskinan menyediakan akses yang sangat dibutuhkan untuk air dan sanitasi, menurunkan angka kematian anak dan secara drastis meningkatkan kesehatan ibu. *MDGs* juga memulai gerakan global untuk pendidikan dasar gratis yang pada akhirnya menginspirasi negara-negara untuk berinvestasi pada generasi masa depan mereka. Yang paling penting, *MDGs* membuat langkah besar dalam memerangi HIV / AIDS dan penyakit lain yang dapat diobati seperti malaria dan TBC.

Namun, kegagalan *MDGs* pada tahun 2015 dalam pencapaian tujuan tujuan pembangunan membuat Pada 2015 membuat negara negara merancang suatu formulasi baru yang diharapkan dapat menjadi lanjutan *MDGs* dan dicapai pada tahun 2030. Oleh karena itu, PBB meluncurkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). *SDGs* ini sendiri diadopsi oleh kurang lebih 193 negara anggota dan tujuan tujuan tersebut pada dasarnya merupakan awal baru langkah internasional yang akan sangat

menentukan keberlangsungan manusia menuju pembangunan berkelanjutan. Baik *MDGs* dan *SDGs* pada dasarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi tujuan maupun proses penyusunannya. *MDGs* yang gagal sebelumnya memiliki 8 tujuan dan memiliki sasaran serta indikator yang lebih sederhana dibandingkan *SDGs* itu sendiri yang sasarannya hanya mengurangi sebagian dari setiap masalah yang ada. Selain itu, *MDGs* ini pada dasarnya memberikan beban yang sangat besar kepada negara-negara yang sedang berkembang karena proses pembuatannya tidak melibatkan peran *stakeholders* diluar pemerintah seperti *NGO*, Akademisi, serta *MNC* dan kelompok non-pemerintah lainnya.

Berbeda dengan *MDGs*, *SDGs* sendiri memiliki 17 tujuan yang pada dasarnya diharapkan dapat meliputi masalah-masalah keamanan manusia serta mengakomodir isu pembangunan yang sebelumnya tidak ada di *MDGs*. Terlebih lagi, *SDGs* juga memiliki target dalam menuntaskan setiap tujuan dan sasaran yang ada. *SDGs* sendiri memberikan peran yang seimbang terhadap seluruh negara tanpa melihat apakah negara tersebut merupakan negara maju atau negara berkembang dalam memberikan kontribusi serta tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam *SDGs*. *SDGs* juga lebih terbuka dalam proses penyusunannya karena PBB sendiri memberikan ruang kepada *stakeholders* non-pemerintah dalam menyusun target-target yang ada dalam *SDGs* melalui forum-forum yang dihadiri oleh *stakeholders* non-pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memberikan *insight* dari *global citizens* dalam menentukan agenda yang dianggap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

*SDGs* pada dasarnya adalah komitmen internasional untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh PBB yaitu *MDGs* itu sendiri, dan mengatasi beberapa tantangan yang lebih mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Terlebih lagi, semua 17 Sasaran saling berhubungan, yang berarti keberhasilan dalam satu hal memengaruhi kesuksesan bagi orang lain. Adanya ancaman perubahan iklim berdampak pada bagaimana suatu negara mengelola sumber daya alam yang rapuh, mencapai kesetaraan gender atau kesehatan yang lebih baik pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan,

dan mendorong perdamaian dan masyarakat inklusif akan mengurangi ketidaksetaraan dan membantu ekonomi yang lebih baik.

## **2.2. Sustainable Development Goals in China**

Kehadiran Presiden Xi Jinping dalam *United Nations Sustainable Development Summit* dalam proses pengesahan *Sustainable Development Goals* turut memberikan kontribusi dalam proses tercapainya *SDGs*. Konferensi Tingkat Tinggi mengenai pembangunan berkelanjutan ini dirundingkan dan juga disahkan bersama dengan kepala negara lainnya dengan harapan dapat melakukan pemetaan arah dan upaya dalam melakukan pembangunan baik secara domestik dan internasional (China M. o., 2017).

Tiongkok sendiri sangat mementingkan penerapan dari agenda pembangunan berkelanjutan ini. Dapat dilihat dari pemerintahnya yang melakukan integrasi ke dalam *13th Five-Year Plan for Economic and Social Development* beserta rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Pada Oktober 2015, Presiden Xi Jinping juga mengeluarkan *statemet* bahwa Tiongkok akan berusaha untuk mengangkat 70 juta lebih orang yang hidup di bawah kemiskinan agar dapat keluar dari kemiskinan (China M. o., 2017). Hal ini menandakan langkah penting Tiongkok dalam upaya menyukseskan *SDGs* beserta target target yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi, pemerintah Tiongkok juga memiliki visi dalam melakukan rencana implementasinya. Rencana ini didukung dengan visi yang inovatif, terkoordinasi, *green*, terbuka, dan pembangunan bersama. Tiongkok juga berupaya menyelelarkan antara ekonomi, politik, budaya, sosial untuk memaksimalkan proses implementasi melalui penyelarasan strategi dengan aktor aktor yang dapat membantu baik dari proses pembuatan kebijakan dan juga proses implementasi kebijakan. Dengan adanya penyelarasan ini, diharapkan dapat memastikan adanya jaminan kelembagaan, mobilisasi sosial, manajemen resiko dan kerjasama internasional untuk memaksimalkan kebijakan kebijakan yang ada dan meminimalisir adanya hambatan hambatan dalam proses pengimplementasian.

Dalam hal *food security* di Tiongkok sendiri, *13th Five-Year Plan for Economic and Social Development* yang merupakan hasil integrasi *SDGs* dengan kebijakan domestik Tiongkok dan merupakan rencana lima tahun terbaru Tiongkok dari tahun 2016 hingga 2020 menetapkan dua tujuan yang sangat penting bagi sektor pertanian khususnya dalam mencapai ketahanan pangan. Tujuan yang pertama adalah mencapai swasembada dalam beberapa bahan pangan yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di Tiongkok seperti nasi, jagung, dan gandum yang merupakan sumber kalori untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pangan dan tujuan kedua adalah mencapai ketahanan pangan yang absolut. Meskipun begitu, untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam hal bahan pangan bukan merupakan hal yang mudah bagi Tiongkok. Hal ini memerlukan modernisasi dari sektor pertanian, termasuk memaksimalkan fungsi dari pertanian kecil yang ada di Tiongkok agar dapat menjadi lebih besar untuk meningkatkan skala ekonomi. Petani juga perlu menerima edukasi dalam bentuk pelatihan tambahan dalam teknik pertanian modern tersebut untuk melakukan optimalisasi hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan domestik.

### **2.3. Tujuan dan Standar Sustainable Development Goals.**

#### 2.1 Tabel Tujuan dan Standar *SDGs* Tiongkok

No	Tujuan	Standar
1.	Mengentaskan kelaparan	Mengentaskan kelaparan terutama bagi orang miskin di situasi yang rentan, termasuk anak-anak dan juga pangan yang cukup sepanjang tahun.
2.	Mengentaskan malnutrisi	Mengurangi kurang gizi terutama untuk anak di bawah lima tahun, dan juga remaja, serta ibu hamil dan orang lanjut usia.
3.	Produktivitas agrikultur	Meningkatkan produktivitas agrikultur dan juga pemasukan dari penghasil pangan

		termasuk akses terhadap lahan, pasar, dan pengetahuan akan pangan.
4.	Keberlanjutan pangan	Memastikan adanya keberlangsungan dari produksi pangan namun tetap menjaga ekosistem yang ada.
5.	Menjaga keberagaman pangan	Melakukan diversifikasi hasil pangan baik dalam level nasional, regional, dan internasional.
6.	Meningkatkan investasi	Melakukan kerjasama internasional, pembangunan infrastruktur, dan dan perkembangan dalam hal teknologi pangan terutama terhadap negara berkembang.
7.	Mencegah perdagangan diskriminatif	Mencegah distorsi pasar melalui sesuai dengan mandat dari <i>Doha Development Round</i> .
8.	Memastikan komoditas pangan	Memastikan adanya fungsi yang baik dari komoditas pangan di pasar termasuk adanya informasi yang jelas untuk mencegah adanya perubahan harga yang ekstrim.

Sumber: *Sustainable Development Goals in Action, United Nations.*

Dalam menetapkan standar dan tujuan yang terdapat dalam kebijakan domestik, Tiongkok melakukan integrasi tujuan dan standar yang ada dalam *SDGs*. Adanya standard dan tujuan harus disusun sedemikian rupa agar dapat diukur tingkat keberhasilan dari adanya proses implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, dengan adanya standard dan tujuan tertentu diharapkan harus dapat dicapai oleh aktor aktor yang merupakan pelaksana kebijakan.

Dilihat dari standar dan tujuan yang ada dirumuskan dalam *SDGs* dengan *13th Five-Year Plan for Economic and Social Development* yang merupakan kebijakan

domestiknya, Tiongkok merumuskan dan menyesuaikan standar dan tujuan dengan kondisi yang ada di Tiongkok sehingga dapat lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada di Tiongkok baik secara ekonomi, politik, dan sosial sehingga proses pengimplementasian kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan dapat disesuaikan dengan keadaan Tiongkok itu sendiri.

#### **2.4. Aktor Dalam Memaksimalkan Proses Implementasi *Sustainable Development Goals*.**

Banyak aktor yang akan menentukan keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan. Dalam hal ini, institusi dan manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan apakah implementasi kebijakan akan berhasil atau tidak. Tahap tahap dari implementasi kebijakan akan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain dari institusi dan SDM, sumber daya finansial juga menjadi salah satu hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam proses pengimplementasian kebijakan di Tiongkok, ada beberapa aktor yang memiliki peran yang signifikan dalam mensukseskan kebijakan kebijakan yang sudah direncanakan dalam *13<sup>th</sup> Five Year Plan for Economic and Sosial Development* diantaranya *Chinese Minister of Agriculture and Rural Affairs (MARA)* yang merupakan bagian dari pemerintahan Tiongkok yang secara khusus mengurus masalah agrikultur. Selain itu, organisasi internasional seperti *Food and Agricultural Organization (FAO)*, *The International Fund for Agricultural Development (IFAD)* dan *World Food Program (WFP)* yang merupakan tiga badan PBB yang membantu strategi revitalisasi agrikultur terutama di pedesaan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok dan disinergikan dengan misi dan tujuan dalam mempromosikan *Sustainable Development* di Tiongkok secara khusus sektor pangan di pedesaan. Adanya institusi ini akan membantu mencapai *SDGs* sesuai dengan kebijakan domestik Tiongkok mengenai implementasi agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. (Affairs, 2018)

Setiap aktor ini memiliki fungsi yang pada akhirnya akan membantu pemerintah Tiongkok dalam menunjang keberhasilan dari *13<sup>th</sup> Five Year Plan for Economic and Sosial Development*. *Minister of Agriculture and Rural Affairs* yang selanjutnya akan disebut dengan MARA berperan dalam proses perancangan dan pengimplementasian kebijakan yang berhubungan dengan agrikultur, mekanisme pertanian, peternakan, perikanan dan kualitas dari produk pangan itu sendiri. Terlebih lagi, MARA juga memiliki peran dalam pengawasan dan memastikan pembangunan di pedesaan karena pada akhirnya tujuan dari adanya *self-sufficiency* dalam sektor pangan adalah untuk menghilangkan kemiskinan yang ekstrim. Pada tahun 2018, MARA digantikan *Ministry of Agriculture (MOA)* dan menyerap sebagian besar fungsi dari kementerian yang sebelumnya, namun juga memiliki fungsi dalam mengurus investasi pertanian dari *Komisi Pembangunan Nasional*. (Affairs, 2018)

*Food and Agricultural Organization (FAO)* yang dibawah PBB memiliki badan khusus yaitu *Agriculture and Consumer Protection Department (AG)* yang berfungsi untuk memperkuat peran pertanian dalam mengurangi kelaparan dan kemiskinan. Badan ini juga berfungsi untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Secara keseluruhan, Departemen ini juga bekerja sama dengan institusi internasional lainnya yang bergerak dalam bidang pangan untuk mengatasi berbagai masalah yang akan memengaruhi kualitas makanan termasuk peningkatan produksi pangan, pengelolaan dan konservasi tanaman dan ternak, pencegahan hama dan penyakit dari tanaman dan hewan, keamanan dan kualitas pangan serta melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pertanian (FAO, *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, 2019) Selain itu, badan ini memiliki mandat untuk membantu petani dalam melakukan diversifikasi produk pangan, menjaga kesehatan tanaman dan hewan, memasarkan produk pangan dan melakukan pelestarian terhadap sumber daya alam. Badan ini juga membantu dalam melakukan penyaringan bahan pangan yang berkualitas sehingga dapat meminimalisir resiko terhadap kesehatan manusia.

*International Fund for Agricultural Development (IFAD)* juga memiliki peran yang cukup unik dalam membantu Tiongkok memaksimalkan implementasi kebijakan

yang ada. Menurut IFAD, adanya malnutrisi akan menyebabkan masalah kesehatan dan kerugian dalam produktivitas ekonomi, termasuk kerugian PDB. Selama masa hidup mereka, orang-orang yang kekurangan gizi dapat memperoleh 10 persen lebih sedikit daripada mereka yang bergizi baik (IFAD, 2019). Terlebih lagi, IFAD percaya bahwa tanpa adanya akses makanan yang cukup, terjangkau, dan bergizi, manusia akan tetap terjebak dalam kemiskinan karena tidak mampu memanfaatkan kesempatan dan pendidikan yang digunakan untuk memaksimalkan potensi mereka sehingga pada akhirnya investasi dalam hal pangan melalui pertanian merupakan suatu tanggung jawab kebijakan pembangunan yang baik pula. IFAD berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui perbaikan sistem produksi pangan dan membuat proyek proyek yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Terlebih lagi, IFAD memiliki keunikan dalam merancang proyek proyeknya dimana IFAD memiliki proyek yang *gender-sensitive*. IFAD memberikan perhatian khusus pada peran wanita yang memiliki persentase besar dari tenaga kerja yang ada dalam bidang pertanian. Melalui pendekatan yang pangan yang unik inilah IFAD membantu dalam mendukung perbaikan dari sistem pangan yang berguna untuk meningkatkan keamanan gizi.

## **2.5. Dukungan Lingkungan Sosial dan Politik Terhadap SDGs**

### **2.5.1. Lingkungan Sosial dan Budaya**

Lingkungan sosial budaya dalam hal pangan di Tiongkok memiliki karakteristik yang turun temurun dan berkembang. Sejarahnya, Tiongkok sudah mempertahankan pembangunan pangan sejak masyarakat masih primitif. Dari mulai zaman Dinasti hingga sekarang, masyarakat sosial di Tiongkok masih tetap memegang filosofi dalam menyediakan makanan yang cukup untuk masyarakat. Makanan juga menjadi prioritas utama bagi orang-orang di Tiongkok. Terlebih lagi, ajaran Konfusius mengatakan bahwa keinginan untuk makan dan seks merupakan kebutuhan dasar dari sifat manusia. Perhatian yang diberikan masyarakat di Tiongkok terhadap pangan membuat mereka selalu mencoba mengembangkan berbagai jenis sayuran untuk bertahan hidup terutama pada saat terjadi bencana (Zhou, 2007). Proses modernisasi



dari industri pangan juga tidak dapat menghilangkan budaya tradisional dari masyarakat di Tiongkok. Modernisasi yang terjadi di Tiongkok tetap mengikuti tradisi yang dapat diterima secara luas oleh konsumen secara khusus masyarakat di Tiongkok. Selain itu, terdapat perubahan pemikiran yang ada di masyarakat Tiongkok dimana sebelumnya masyarakat hanya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan makanan yang cukup sehingga ketika mereka sudah mendapatkan makan dengan baik maka kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Namun, sekarang pola pikir tersebut berubah dimana banyak orang berada dalam transisi pola pikir yang sebelumnya menjadi pemilihan makanan yang lebih rasional dimana masyarakat juga mulai mempertimbangkan nutrisi dan fungsi pangan (Zhao, 2000)

Selain perubahan pola pemikiran masyarakat Tiongkok yang sudah mulai berkembang, terdapat pula budaya yang sudah lama tertanam dalam masyarakat yaitu *banquet culture* atau budaya jamuan. Tiongkok merupakan masyarakat yang paling maju dalam hal budaya jamuan, Hal ini dikarenakan jamuan dalam masyarakat sosial di Tiongkok memiliki fungsi serta elemen elemen seperti struktur, kekuatan dan simbol. Sut Yat Sen pernah berkata bahwa meskipun Tiongkok tertinggal dari berbagai sektor dengan negara di bagian Barat, Tiongkok tetap maju dalam hal makanan. Hal ini ditunjukkan oleh industri makanan Tiongkok yang sangat berkembang baik dalam hal ketersediaan bahan, cara memasak dan budaya jamuan (Chen, Gang, & Wang, 2017). Budaya jamuan yang ada di Tiongkok sudah menjadi bagian dari sistem ritual dan adat. Jamuan ini biasanya dilakukan dalam festival, interaksi sosial dan bahkan kegiatan keluarga kerajaan di tingkat tertinggi, pejabat pemerintah, dan warga tingkat menengah serta penduduk pedesaan. Hal ini menjadi suatu hal yang mengikat masyarakat Tiongkok karena dalam jamuan itu sendiri terdapat implikasi terkait dengan kekuasaan, rasa hormat, dan simbol. Di masa sekarang, cara masyarakat Tiongkok dalam memperlakukan orang lain terutama dalam menjamu menjadi suatu kemewahan tersendiri sehingga dapat dilihat bahwa prioritas negara Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pangan di negaranya berangkat dari suatu sistem budaya yang sudah ada sejak lama.

### 2.5.2. Lingkungan Politik

Meningkatnya permintaan akan produk pertanian pada dasarnya seringkali bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan terutama dalam sektor pertanian. Tidak jarang pencapaian dari ketahanan pangan sendiri malah mengakibatkan kerusakan yang cukup parah dan pada akhirnya memengaruhi lingkungan sekitar. Sumber pencemaran yang berhubungan dengan pertanian meliputi penggunaan bahan kimia secara berlebihan, kurangnya pengelolaan limbah hasil industri, dan adanya kontaminasi dari air irigasi limbah. Tiongkok sendiri merupakan penghasil gas rumah kaca yang cukup besar dibandingkan dengan sebagian besar negara (CSIS, 2019). Tingginya polusi yang ada mencerminkan industrialisasi besar-besaran yang sedang dilakukan oleh Tiongkok. Adanya masalah masalah terkait polusi yang pada akhirnya berdampak terhadap ketahanan pangan Tiongkok membuat Tiongkok menerapkan kebijakan kebijakan yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalisir polusi dan memaksimalkan produk agrikultur.

Pada awal Juni 2019, Tiongkok mengumumkan bahwa Shanghai secara aktif akan mempromosikan industri hijau (*environmentally-friendly industry*) dalam upaya untuk bergerak menuju kawasan industri yang lebih berkelanjutan. Program baru ini bertujuan untuk mengurangi emisi, menghemat energi dan mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan. Sejauh ini, kota kota di Tiongkok telah berkomitmen untuk membentuk 20 taman industri hijau dan 100 pabrik hijau pada tahun 2020, serta menciptakan sistem baru untuk standar dan penilaian manufaktur yang ramah lingkungan. Shanghai juga bertujuan untuk memotong energi yang digunakan produk domestik bruto (PDB) sebesar 3,6 persen di tahun 2019 (Carey, 2018).

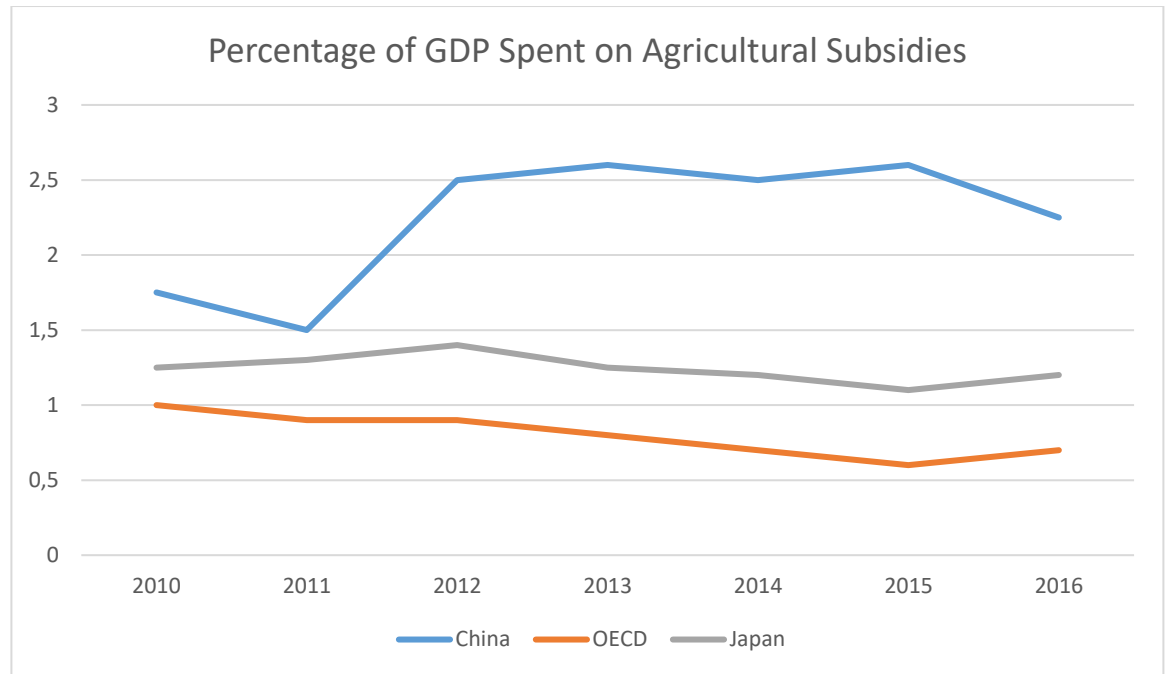
Selain itu, di Beijing, 1.000 perusahaan manufaktur akan ditutup pada tahun 2020 sebagai bagian dari inisiatif untuk mengurangi kabut asap dan meningkatkan pendapatan di daerah-daerah di sekitar pusat-pusat industri. Terlepas dari motifnya, inisiatif industri hijau baru ini tentu bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan karena Tiongkok menjadi penghasil emisi karbon terbesar di dunia, dengan 9.040.000 metrik ton setiap tahun, atau 28 persen dari pembakaran bahan bakar global. Sebagai

perbandingan, Amerika Serikat mengeluarkan 4.997 metrik ton per tahun (Carey, 2018). Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh tim dari Universitas Renmin Beijing menunjukkan bahwa 1,8 juta orang di China meninggal akibat pencemaran lingkungan pada tahun 2015 saja. Data ini merupakan 20-22 persen dari semua kematian dalam satu tahun. Sebagian besar kematian terkait polusi adalah di antara minoritas dan orang-orang yang terpinggirkan.

Dalam *The 13<sup>th</sup>-Five-Years-Plan* Tiongkok, terdapat pula rencana modernisasi sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan fondasi dalam mencapai ketahanan pangan di suatu negara. Untuk mencapai pertumbuhan pertanian yang cepat, maka sektor pertanian harus melakukan modernisasi dalam sektor pertanian diimbangi dengan kecepatan produksi yang efektif dan efisien. Dalam rencana lima tahun ini, Tiongkok akan menerapkan sistem perlindungan dalam lahan dan melakukan strategi produksi pangan yang berdasarkan penerapan teknologi. Modernisasi yang dilakukan Tiongkok tidak hanya berfokus pada peningkatan teknologi pertanian, tetapi Tiongkok juga akan memperbaiki sistem irigasi lahan dan juga infrastruktur pemeliharaan air serta pemulihan tanah pedesaan yang dapat menjadi lahan pertanian di kemudian hari. Dalam rencana lima tahun ini, Tiongkok juga akan mengembangkan pertanian ramah lingkungan yang implementasinya akan berupa pengurangan dalam penggunaan pupuk kimia dan pestisida serta mendorong pemulihan sumber daya dan memastikan pembuangan limbah yang aman dari industri industri yang ada.

### 2.5.3. Lingkungan Ekonomi

Gambar 2.1 Persentase PDB Tiongkok untuk Subsidi Produk Pertanian



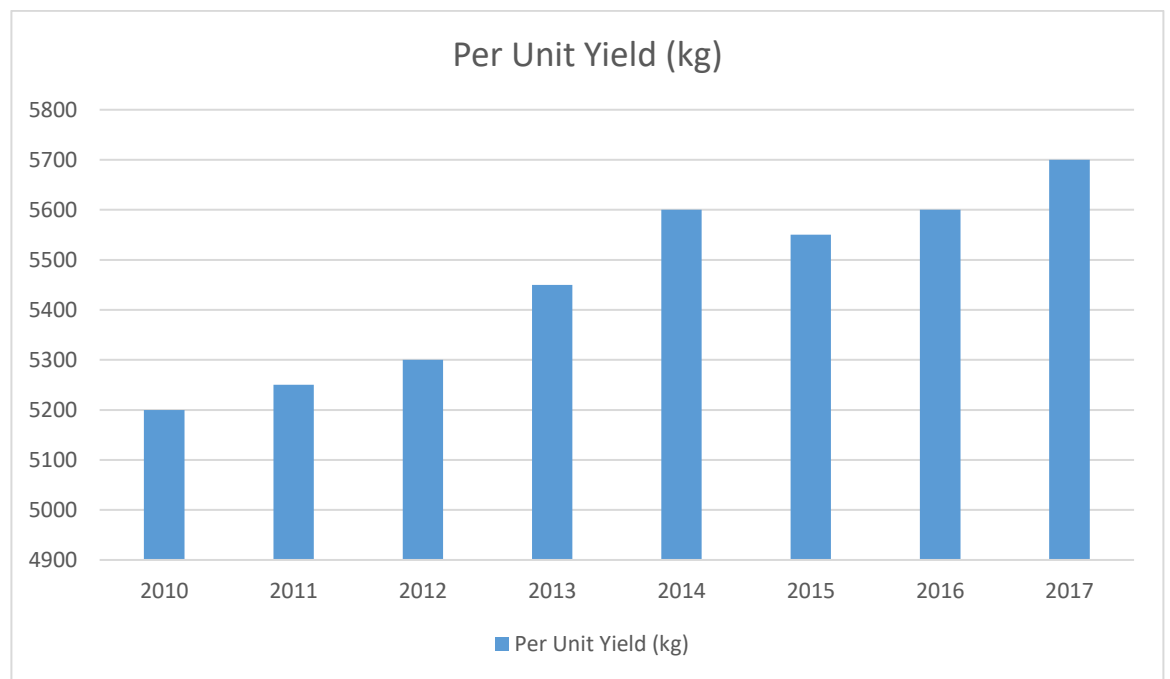
Sumber: FutureDirection, 2017

Tiongkok menghabiskan banyak biaya untuk memberikan subsidi pada sektor pertanian dibandingkan negara lain. Pengeluaran untuk subsidi pertanian meningkat pada 2015. Sebanyak US\$248 miliar dari pemerintah Tiongkok untuk petani. Secara keseluruhan, negara OECD telah mengurangi subsidi pertanian selama 16 tahun terakhir, ementara Tiongkok terus menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendukung sektor pertanian sebanyak 223 miliar USD pada tahun 2016 (OECD, 2016). Subsidi yang diberikan Tiongkok untuk petani dalam memproduksi jenis tanaman tertentu mendorong petani untuk memproduksi bahan pangan dengan harga produksi yang lebih rendah untuk diimpor ke negara lain. Selain itu, adanya subsidi ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Kondisi lingkungan di Tiongkok yang seringkali tidak cocok dalam memproduksi beberapa jenis tanaman membuat pada akhirnya para petani di Tiongkok menggunakan air dan pupuk dalam jumlah yang berlebihan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman

agrikultur (International, 2017). Namun, hal ini pada akhirnya mengakibatkan keamanan lingkungan dan air terganggu. Dengan mengalihkan subsidi dari dukungan harga ke modernisasi, penelitian dan pengembangan sektor pertanian serta program-program anti polusi, Tiongkok lebih cenderung meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sistem pertaniannya.

## 2.6. Ketersediaan Pangan di Tiongkok

Gambar 2.2 Ketersediaan Pangan di Tiongkok Pada Tahun 1961-2017

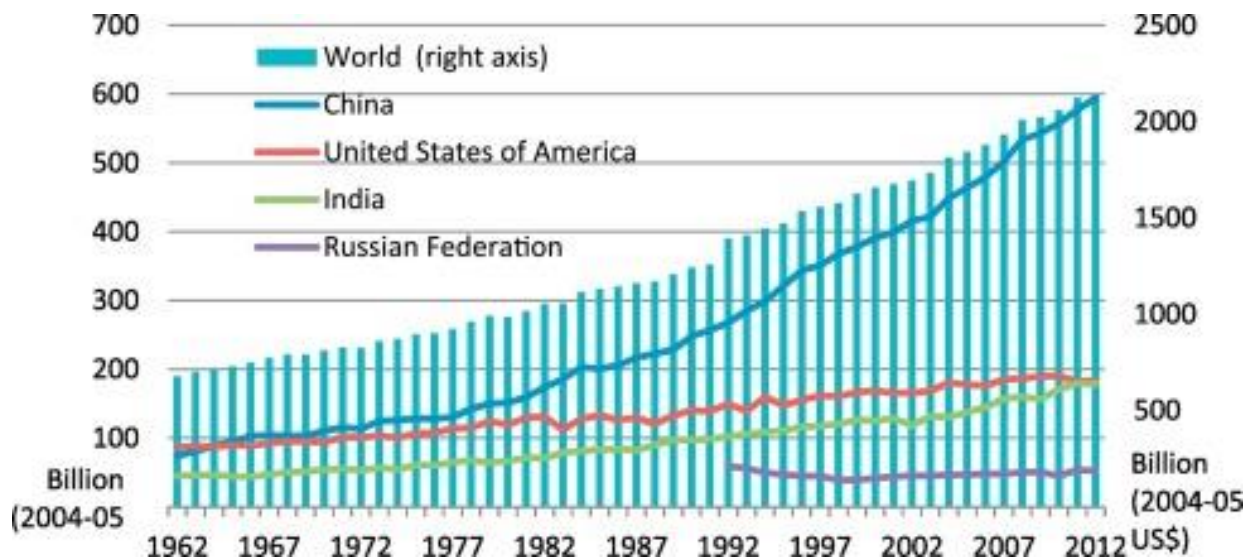


Sumber: National Bureau of Statistics

Perkembangan dalam situasi ketahanan pangan di Tiongkok dapat dilihat pada Gambar 2.2. Baik dalam hal produksi pangan dan ketersediaan pangan total per kapita mengikuti jalur yang sama, karena impor pangan relatif kecil (FAO, World Food Summit, 1996). Dapat dilihat pada tahun 1998-1999 ketersediaan Tiongkok cukup stagnan dan bahkan menurun di dua tahun berikutnya. Pada data tahun 2018 angkanya produksi mendekati 660 juta ton, naik 30 persen dari tahun 1996 (500 juta ton). Tahun dimana Tiongkok mulai membuat *white paper* pertama yang mengatur mengenai *food*

*security* naik 116 persen di atas 1978 (300 juta ton), tahun peluncuran Tiongkok terhadap reformasi lahan naik hampir 600 persen selama tahun 1949 (110 juta ton).

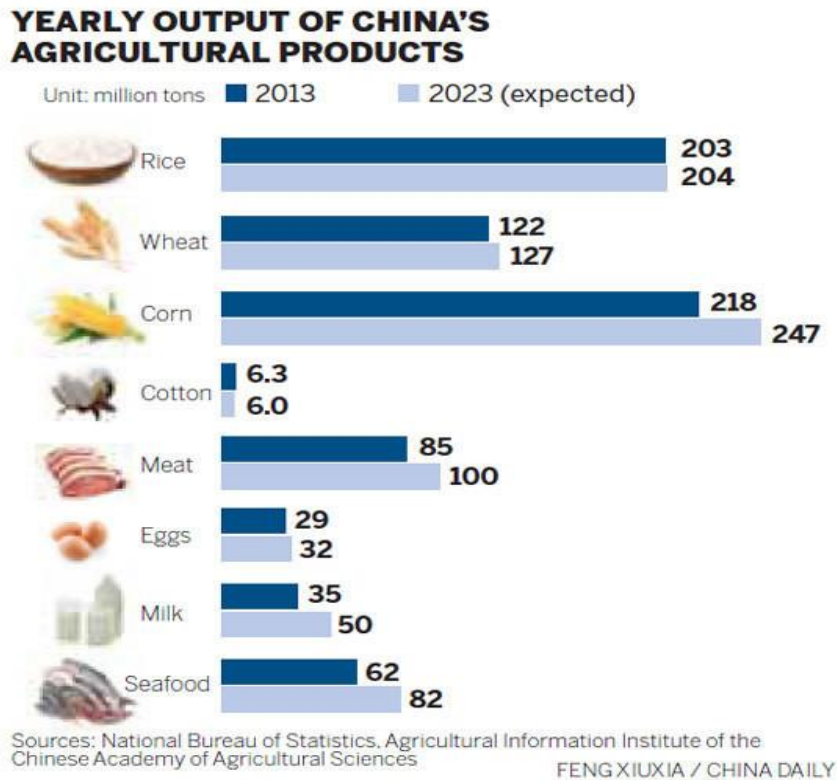
Gambar 2.3 Ketersediaan Pangan di Tiongkok Pada Tahun 1962-2012



Sumber: ScienceDirect, 2019

Dibandingkan dengan industri pertanian di negara lain, industri pertanian Tiongkok ditandai oleh terbatasnya lahan subur dan tenaga kerja besar yang terlibat dalam produksi pertanian. Kelangkaan relatif lahan subur menyiratkan bahwa secara umum Tiongkok cenderung memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dalam produksi tanaman padat karya, seperti buah-buahan dan sayuran, dan kerugian dalam produksi tanaman intensif lahan, seperti biji-bijian (Sheng & Song, 2019). Namun, struktur produk industri saat ini tidak mencerminkan keunggulan komparatif yang mendasarinya, dan sebaliknya mencerminkan pola produksi yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah terkait yang mendukung produksi sereal dan biji-bijian untuk memenuhi permintaan domestik. Terlebih lagi, dari tahun 2012, ketersediaan pangan di Tiongkok meningkat lebih signifikan dibandingkan negara-negara lain dengan populasi yang sama seperti India dan Rusia.

Gambar 2.4 Ekspektasi Ketersediaan Pangan di Tiongkok Pada Tahun 2023



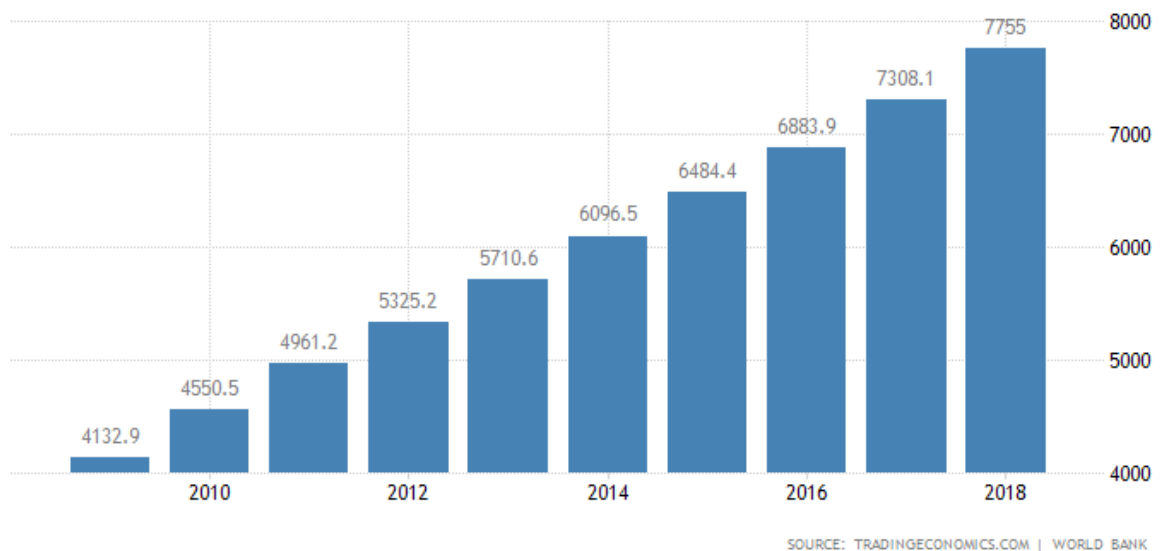
Sumber: National Bureau of Statistics, Agricultural Information Institute of the Chinese Academy of Agricultural Science

Gambar 2.4 menunjukkan ekspektasi output dari produk agrikultur di Tiongkok pada tahun 2023. Dalam Gambar ini dilihat bahwa Tiongkok fokus dalam memproduksi bahan-bahan pangan yang menjadi makanan pokok yang penting bagi masyarakat di Tiongkok seperti nasi, gandum, dan jagung yang memang pada dasarnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan karbohidrat. Meskipun begitu, untuk bahan pangan lainnya seperti daging, telur, susu, dan makanan laut tetap meningkat meskipun tidak signifikan sebagai bahan pangan pokok lainnya.

## 2.7. Akses Masyarakat Tiongkok Terhadap Pangan

Akses terhadap pangan (*access*) yang dimaksud adalah kondisi dimana terdapat jumlah pangan yang cukup baik dalam skala nasional maupun internasional dan orang-orang bisa mendapatkan bahan pangan itu sendiri yang didukung dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai pendapatan, harga pasar, agar semua orang dapat memenuhi tingkat kebutuhan pangannya dan mencapai konsep ketahanan pangan itu sendiri. Menurut Fengying dalam *Study on China's Food Security Status*. Akses terhadap pangan ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator pendapatan bersih per kapita oleh negara.

Gambar 2.5 Produk Domestik Bruto Tiongkok Per Kapita



Sumber: Trading Economics, 2020

Produk Domestik Bruto pada dasarnya merupakan suatu indikator pertumbuhan di suatu negara. PDB ini sendiri memperhatikan jumlah produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah. PDB dapat menjadi indikator akses masyarakat terhadap pangan karena dalam perhitungannya, PDB memiliki empat komponen yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta ekspor bersih atau ekspor neto. Pangan sendiri termasuk dalam komponen konsumsi yang



dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu berupa *service* atau jasa, *non-durable goods* yang merupakan barang yang langsung dikonsumsi dan habis manfaatnya seperti makanan dan minuman, serta *durable goods* yang merupakan barang yang tidak cepat rusak dan memiliki umur yang relative panjang atau minimal lebih dari tiga tahun seperti kendaraan dan elektronik. Akses masyarakat terhadap pangan dapat dilihat melalui PDB yang meningkat disertai hasil total produksi produk pangan di suatu negara. Peningkatan PDB dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam membeli dan memenuhi kebutuhannya dalam komponen konsumsi secara khusus untuk *non-durable goods*.

Produk Domestik Bruto per kapita di Tiongkok terakhir tercatat pada 7755 USD pada 2018. PDB per kapita di Tiongkok setara dengan 61 persen dari rata-rata dunia. PDB per kapita di Cina rata-rata 1.762,12 USD dari tahun 1960 hingga 2018, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa 7755 USD pada tahun 2018 dan rekor terendah 132,30 USD pada tahun 1962.

Laporan tentang Pemantauan Kemiskinan di daerah pedesaan Tiongkok dari Biro Statistik Nasional menunjukkan hal itu merupakan alasan utama pertumbuhan PDB ini adalah pendapatan upah meningkat dengan cepat, yang kedua adalah adanya peningkatan harga produk pertanian menghasilkan pendapatan bersih yang lebih tinggi dari pertanian dan yang ketiga adalah pendapatan keuangan bersih meningkat ketika Tiongkok mulai memperkenalkan subsidi seperti melakukan perubahan lahan pertanian untuk produksi biji-bijian. Selain itu hal ini juga akan berdampak pada pendapatan bersih petani.

## **2.8. Tingkat Kesehatan dan Nutrisi Masyarakat Tiongkok**

Sejak 1978, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar dalam sejarah. Kemajuan luar biasa ini telah mengubah Tiongkok dari negara yang sedang berjuang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun demikian, karena disparitas kekayaan yang meluas dan kekurangan gizi yang masif di Tiongkok, negara tersebut masih dianggap sebagai negara berkembang dan terus memerangi dampak kemiskinan

ekstrem (Perez E. , 2016). Karena pertumbuhan ekonominya, Tiongkok menjadi negara pertama yang mencapai *MDGs* untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan kelaparan menjadi dua. Meskipun begitu, masih ada 150 juta orang di Tiongkok yang dianggap kurang gizi. Kebanyakan dari mereka yang menderita kelaparan adalah wanita, anak-anak dan orang tua dari daerah pedesaan. Terlebih lagi, terdapat angka yang cukup tinggi dalam masalah kesehatan di Tiongkok yaitu 9,4 persen untuk kurang gizi pada anak-anak, 19,6 persen untuk anemia dan 25 persen untuk kelebihan berat badan dilihat dari perbandingan nasional dan global (WFP, 2019).

Nutrisi adalah fondasi material penting bagi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan manusia dan kesehatan yang baik. Kondisi gizi nasional relevan dengan peningkatan kualitas pembangunan nasional dan sosial ekonomi. Namun, masalah seperti kekurangan gizi dan kelebihan gizi, insiden penyakit yang tinggi dan berhubungan dengan gizi serta kurangnya kesadaran akan nutrisi dan gaya hidup sehat, menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi kondisi kesehatan nasional terutama *food security* itu sendiri.

Tiongkok sendiri masih sangat lemah dalam memastikan tingkat kesehatan dan pemenuhan nutrisi di negaranya. Hal ini dapat dilihat dengan dibuktikan dengan dikeluarkannya *National Nutrition Plan (2017-2030)* yang pada dasarnya merupakan fondasi Tiongkok dalam memaksimalkan tingkat kesehatan dan nutrisi domestiknya. Tujuan terdekat dari kebijakan ini adalah membuat sistem regulasi standar untuk nutrisi pada tahun 2020. Tiongkok akan membuat kerangka kerja yang pada dasarnya digunakan untuk memenuhi standar kesehatan dan malnutrisi di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten secara bertahap. Semua sektor yang menunjang hal ini seperti agrikultur dan industri kesehatan akan dikembangkan dan tingkat informasi mengenai nutrisi dan kesehatan akan ditingkatkan secara bertahap.